

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi merupakan salah satu negara di Kawasan Timur Tengah yang pendapatannya sangat bergantung pada ekspor minyak. Arab Saudi juga merupakan negara pengekspor minyak terbesar di dunia.¹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Energy Information Administration*, Arab Saudi menduduki posisi pertama dari tahun 1989 sampai tahun 2016 sebagai negara pengekspor minyak terbanyak.² Namun, sejak pertengahan tahun 2014 harga minyak turun secara drastis. Harga minyak mentah yang awalnya \$100 per barel turun di bawah \$50 per barel pada awal Januari 2015 untuk pertama kalinya sejak tahun 2009. Meskipun harga minyak kembali pulih setelah itu, ada indikasi bahwa harga minyak mentah akan turun dan tidak akan naik kembali dalam waktu dekat.³

Sampai tahun 2015, Arab Saudi masih memiliki ketergantungan pendapatan terhadap minyak. Hal ini dibuktikan dengan 72 persen pendapatan Arab Saudi berasal dari pendapatan minyak dan 28 persen berasal dari pendapatan non-minyak.⁴ Ketergantungan ini menyebabkan Arab Saudi mengalami defisit sebanyak 367 miliar riyal (\$97,9 miliar). Keuangan Arab Saudi mengalami penurunan karena harga minyak yang rendah. Kemudian pemerintah mengumumkan rencana untuk

¹ Peachy Essay, "Saudi Arabia Vision for Life After Oil: An Investment Driven Economy", <https://peachyessay.com/sample-essay/saudi-arabia-vision-for-life-after-oil-an-investment-driven-economy/> (diakses pada 18 September 2019).

² Energy Information Administration <http://www.eia.gov> (diakses pada 18 September 2019).

³ The World Bank, "Plunging Oil Prices", *MENA Quarterly Economic Brief* (2015): 3.

⁴ KPMG. "Kingdom of Saudi Arabia Budget Report" (2018): 6.

mengecilkan catatan defisit anggaran negara dengan melakukan pemotongan pengeluaran dan dorongan untuk meningkatkan pendapatan dari sumber non-minyak.⁵

Selain ketergantungan dengan minyak, masalah potensial bagi ekonomi Arab Saudi adalah masalah pengangguran. Diperkirakan pada tahun 2030 sekitar 4,5 juta warga negara Arab Saudi yang berusia di bawah 30 tahun nanti akan memasuki usia angkatan kerja, yang jumlahnya melebihi total warga Arab Saudi yang bekerja pada saat ini.⁶

Oleh sebab itu, muncul perumusan kebijakan *Saudi Vision 2030* untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kondisi minyak yang naik turun dan ancaman bagi perekonomian Arab Saudi.⁷ *Saudi Vision 2030* dikeluarkan pada tahun 2016 oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dan Wakil Perdana Menteri.⁸

Saudi Vision 2030 merupakan kebijakan untuk melakukan reformasi pemerintahan Arab Saudi. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan sektor swasta di Arab Saudi melalui investasi di industri non-minyak, pengadaan pasukan militer lokal, serta privatisasi industri milik pemerintah. Tujuannya adalah untuk

⁵ CNBC, Saudi Plans Spending Cuts, Revenue Push to Shrink 2016 Budget Deficit, 2015 <https://www.cnbc.com/2015/12/28/saudi-arabia-posts-record-98-billion-budget-deficit-for-2015.html> (diakses pada 21 September 2019)

⁶ Panji Haryadi, "Peran Muhammad bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi", *Jurnal ICMES Vol.2 No.1* (2018): 38

⁷ Panji Haryadi, 38

⁸ Panji Haryadi, 31-32

mengembangkan sektor swasta yang dapat menyediakan sumber ekspor non-minyak. Selain itu juga dapat menghasilkan pertumbuhan minyak, dan memperkerjakan warga negara Arab Saudi yang berusia muda.⁹

Saudi Vision 2030 memiliki tiga pilar utama, di antaranya *A Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *An Ambition Nation*.¹⁰ Dalam bidang sosial masyarakat, *Saudi Vision 2030* di bawah pemerintahan Muhammad bin Salman menerapkan tindakan untuk menyingkirkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama. Salah satunya adalah fatwa tentang larangan bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Muhammad bin Salman menganggap bahwa kaum perempuan harus memiliki produktivitas dan harus sejajar dengan laki-laki dalam memajukan negara secara aktif.¹¹

Dalam perjalanannya, *Saudi Vision 2030* sudah mulai melaksanakan reformasi dalam bidang ekonomi dan sosial, yang menjadikan perekonomian Arab Saudi lebih terbuka dengan adanya diversifikasi ekonomi.¹² Arab Saudi juga telah membuka peluang ekonomi dalam sektor investasi. Investasi perdana yang dibuka adalah penjualan saham BUMN Arab Saudi pada sektor minyak bernama Aramco yang bisa mencapai \$100 miliar.¹³

⁹ Joseph Cozza, "Could Vision 2030 Reforms Destabilize Saudi Arabia?", *IndraStra Global* (2016): 2

¹⁰ Nevlita Sianturi, "Pengaruh *Saudi Vision 2030* dan Agenda *Foreign Direct Investment* (FDI) Arab Saudi di Indonesia", *JOM FISIP Vol.4 No.2* (2017): 2

¹¹ Panji Haryadi, 38

¹² Adirini Pujayanti, "Tewasnya Jamal Khashoggi dan Implikasinya bagi Hubungan Luar Negeri Arab Saudi", *Info Singkat Vol.10 No.21* (2018): 8

¹³ Nevlita Sianturi, 3

Sedangkan dalam bidang sosial masyarakat, khususnya perempuan sudah diberikan izin atau kebebasan untuk berkendara dan memasuki stadion atau tempat keramaian lainnya.¹⁴ Pemerintah juga meningkatkan industri pariwisata yang berpotensi akan menjadi destinasi wisata yang besar pada tahun 2030, serta tempat-tempat hiburan yang berada di sekitar Kerajaan Arab Saudi.¹⁵

Namun berbanding terbalik dengan aspek ekonomi dan sosial, dalam aspek politik pemerintah Arab Saudi masih melakukan tindakan yang otoriter, dan masih terdapat larangan untuk menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, Arab Saudi mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang jurnalis yang bernama Jamal Khashoggi. Khashoggi merupakan seorang jurnalis yang melakukan kritikan terhadap tindakan reformasi yang diambil oleh Muhammad bin Salman yang dianggap kontroversial.¹⁶

Di negara Arab Saudi tidak ada izin bagi media-media independen, dimana media tersebut dijaga dan diawasi secara ketat oleh pihak berwenang. Berdasarkan data dari *World Press Freedom Index*, jumlah jurnalis masyarakat yang berada dalam tahanan meningkat terus-menerus sejak awal 2017. Sebagian besar ditahan secara sewenang-wenang dan kemungkinan mengalami penyiksaan. Jurnalis yang

¹⁴ Mahmud Hibatul Wafi, "Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahabi", *Islamic World and Politics Vol.2 No.1* (2018): 231

¹⁵ Mark C. Thompson, "Saudi Vision 2030: A Viable Response to Youth Aspirations and Concern", *Asian Affairs* (2017): 213

¹⁶ Adirini Pujayanti, 8

memberikan kritik dan berpendapat tentang masalah politik dapat dipecah maupun ditahan berdasarkan ketentuan hukum.¹⁷

Berdasarkan pemikiran Samuel Huntington, modernisasi merupakan salah satu faktor pendorong demokratisasi.¹⁸ Menurut David Held, demokrasi tidak dapat berjalan jika sektor politik, ekonomi, dan sosial bekerja secara *in vacuum*, dimana tidak hanya terfokus pada satu sektor saja, jika terjadi modernisasi di bidang ekonomi dan sosial, maka akan berdampak juga pada modernisasi politik.¹⁹ Modernisasi politik pada akhirnya akan mengarah kepada demokrasi. Alfred Stepan juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa persyaratan kelembagaan dan politik bagi suatu negara untuk bisa dianggap sebagai negara demokratis, di antaranya: Warga negara memiliki kebebasan penuh untuk beribadah secara pribadi; Warga negara harus dapat memajukan nilai-nilai mereka secara publik; Warga negara harus dapat mensponsori organisasi dan gerakan dalam masyarakat politik; Warga negara harus dapat membentuk partai politik tanpa adanya kendala.²⁰

Dalam perjalanannya, modernisasi sektor ekonomi, sosial, dan politik yang dilakukan pemerintah Arab Saudi tidak sejalan. Hal ini lah yang kemudian menjadikan isu ini penting untuk diteliti melihat apa alasan modernisasi ekonomi dan sosial tidak berdampak pada modernisasi politik di Arab Saudi.

¹⁷ Reporters Without Borders for Freedom of Information <https://rsf.org/en/saudi-arabia> (diakses pada 27 November 2019)

¹⁸ Julian Wucherpennig dan Franziska Deutsch, "Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited", *Living Reviews in Democracy* (2009): 2

¹⁹ Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.1 No.1* (2012): 3

²⁰ Alfred C. Stepan, "Religion, Democracy, and the Twin Tolerantions", *Journal of Democracy Vol.11 No.4* (2000): 39-40

1.2 Rumusan Masalah

Arab Saudi sebagai negara yang sangat bergantung kepada penghasilan minyak bumi mengalami penurunan dalam pendapatan negaranya, karena terjadinya penurunan harga minyak pada tahun 2014. Selain ketergantungan dengan minyak, masalah pengangguran juga menjadi hal yang potensial yang harus diantisipasi oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Arab Saudi kemudian merumuskan kebijakan *Saudi Vision 2030* yang di dalamnya terdapat modernisasi ekonomi dan sosial.

Menurut pendapat Samuel Huntington dan David Held, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut merupakan tindakan modernisasi pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat, dimana modernisasi merupakan faktor pendorong terjadinya demokratisasi. David Held juga menjelaskan demokrasi tidak dapat bekerja jika sektor ekonomi dan sosial tidak sejalan dengan sektor politik. Dalam kasus ini, setelah dikeluarkannya *Saudi Vision 2030* yang di dalamnya terdapat modernisasi ekonomi dan sosial, namun tidak berdampak pada modernisasi politik Arab Saudi. Hal ini menjadi penting diteliti melihat mengapa modernisasi ekonomi dan sosial tidak berdampak pada modernisasi politik di Arab Saudi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengapa modernisasi ekonomi dan sosial dalam *Saudi Vision 2030* tidak berdampak terhadap modernisasi politik di Arab Saudi?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa modernisasi ekonomi dan sosial dalam *Saudi Vision 2030* tidak berdampak pada modernisasi politik di Arab Saudi.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara Akademik, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menganalisis alasan suatu negara dalam kasus ini Arab Saudi tidak melakukan modernisasi politik setelah terjadi modernisasi ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu penulis juga berharap tulisan ini bisa menjadi referensi bagi pembaca terkait isu tentang Arab Saudi maupun isu modernisasi politik.

Secara praktik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran bagi pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap negara Arab Saudi.

1.6 Studi Pustaka

Dalam membantu penelitian mengenai modernisasi yang dilakukan Arab Saudi melalui *Saudi Vision 2030*, peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai referensi. Untuk referensi pertama, peneliti merujuk kepada penelitian Jane Kinninmont yang berjudul “Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transformation”. Penelitian ini membahas tentang rencana jangka panjang Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi minyak, dan negara meningkatkan investasi di sektor swasta. *Vision 2030* menyiratkan derajat liberalisasi

sosial untuk memungkinkan tumbuhnya industri hiburan dan pariwisata, serta reformasi ekstensif terhadap sistem pendidikan.

Di dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa *Vision 2030* akan secara signifikan mengubah berbagai elemen kontrak sosial di Arab Saudi. Jika terlaksana sesuai dengan perencanaan, akan mengubah hubungan ekonomi antar warga negara dengan pemerintah, mengganggu beberapa struktur yang bersifat tradisional, dan pada akhirnya menyebabkan kebebasan sosial yang meluas. Renegosiasi kontrak sosial yang efektif menjadi sangat penting apabila negara ingin melembagakan dan mengamankan perubahan ekonomi yang dilakukan.²¹

Penelitian dari Jane Kinninmont ini membantu penulis untuk memberikan pandangan tentang bagaimana transformasi dan pengaruh *Vision 2030* terhadap kontrak sosial warga negara dengan pemerintah di Arab Saudi. Hal ini berguna bagi penelitian yang sedang penulis lakukan.

Referensi kedua adalah dari tesis yang ditulis oleh Brianna Brooke Seymour yang berjudul “The Death of Rentierism in the Kingdom of Saudi Arabia”. Tesis ini membahas tentang kapan akhir dari *rentierism* akan terjadi di Kerajaan Arab Saudi serta tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan hal tersebut. Setelah menyusun pertumbuhan populasi, permintaan konsumsi domestik, dan depresiasi produksi minyak menjadi empat skenario prediksi masa depan yang

²¹ Jane Kinninmont, “Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transformation”, *Middle East and North Africa Programme* (2017)

terpisah, sehingga muncullah hasil akhir bahwa berakhirnya *rentierism* di Arab Saudi akan terjadi sekitar tahun 2022-2033.

Dalam tesis ini juga terdapat analisis tentang lanskap sosial, ekonomi, dan politik dilakukan untuk menggambarkan kewajiban sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah. Alternatif untuk minyak bumi dianalisis menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada alternatif sumber daya alam yang layak untuk mempertahankan *rentierism*. Hambatan utama dalam mempersiapkan akhir dari *rentierism* adalah perbedaan pendapat yang ekstrim di dalam dan antara Keluarga Saud dan lembaga keagamaan, dan kurangnya tujuan yang dinyatakan dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan diversifikasi ekonomi.²²

Referensi kedua ini membantu dalam memberikan gambaran kepada penulis terkait dengan pentingnya minyak bagi Arab Saudi sebagai sumber daya alam *rentier* bagi pendapatan negaranya. Ada banyak hambatan besar yang dihadapi oleh negara Arab Saudi untuk berusaha mengeluarkan diri dari *rentierism*. Penulis memerlukan referensi tersebut dalam mengembangkan penelitian ini.

Referensi ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kamel Alboaouh dan Jon Mahoney yang berjudul “Religious and Political Authority in the Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects”. Artikel tersebut membahas kendala dan tantangan dalam mewujudkan rekonsiliasi antara otoritas agama dan politik di negara

²² Brianna Brooke Seymour, “The Death of Rentierism in the Kingdom of Saudi Arabia”, *The University of Utah* (2012)

Arab Saudi yang mungkin menghasilkan transisi dari monarki teokratis ke bentuk otoritas politik yang lebih konsultatif.

Terdapat tiga syarat minimal untuk mencapai rekonsiliasi antara otoritas politik dan agama di bawah rezim demokratis. Pertama, institusi demokrasi hanya bebas untuk menghasilkan kebijakan dalam batas-batas konstitusi dan hak asasi manusia. Kedua, keputusan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi harus diputuskan oleh pengadilan, bukan oleh eksekutif atau raja. Ketiga, pemerintah dapat memberlakukan batasan pada partai politik agama yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi hanya setelah partai tersebut dibentuk.²³

Artikel jurnal tersebut berguna bagi penulis dalam melihat syarat-syarat minimal untuk mencapai rekonsiliasi antara otoritas politik dan agama di bawah rezim demokratis suatu negara. Selain itu, juga terdapat syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi secara ideal. Penulis memerlukan referensi tersebut dalam mengembangkan penelitian ini.

Referensi keempat adalah penelitian dari Abhishek Deshwal yang berjudul “Revisiting the Theory of Late Rentierism: The Special Case of Kuwait”. Penelitian ini membahas tentang munculnya negara-negara minyak baru dan promosinya ke barisan depan perdagangan dunia dan keuangan menghidupkan kembali konsep *rentier economy*. Asumsi dasar seputar karakterisasi ini adalah bahwa ia menciptakan mentalitas *rentier*. Hal ini telah menyebabkan penjajaran dua paralel ekonomi dimana

²³ Kamel Alboaouh dan Jon Mahoney, “Religious and Political Authority in the Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects”, *MANAS Journal of Social Studies Vol.6 No.2* (2017)

rentier economy didominasi oleh warga negara dan ekonomi produktif yang sebagian besar diisi oleh para ekspatriat.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dari pengamatan data ekonomi di seluruh negara, data tentang ekspatriat, dan warga negara bahwa faktor-faktor ini tidak beroperasi di Kuwait, dimana ide *late rentierism* tidak berlaku di negara tersebut. Di negara Kuwait sewa per kapita tetap tinggi, tidak ada diversifikasi ekonomi yang sebanding dengan Uni Emirates Arab atau Qatar yang terjadi di negara tersebut, dan ekonomi pun hampir sepenuhnya bergantung pada minyak.

Berdasarkan penelitian dari Abhishek Deshwal ini, penulis mendapatkan gambaran bahwa gagasan klasik tentang teori *rentier state* bahwa minyak menghambat demokrasi tidak terlihat konsisten dengan dialami oleh Kuwait dimana fitur-fitur *rentier* dan demokrasi berjalan ke arah yang sama.²⁴

Referensi kelima adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Turhan Yani yang berjudul “Wacana Pemerintahan Demokratis dan Dinamika Politik di Negeri-negeri Timur Tengah (Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki). Artikel tersebut membahas tentang demokrasi yang merupakan otoritas rakyat yang bertentangan dengan pemilihan umum yang berkuasa, supremasi warga sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan pertanggungjawaban pemerintah, tidak berlaku di negara-negara Arab. Menerapkan demokrasi dan mempertahankannya akan membutuhkan perubahan bertahap dan disengaja seperti yang disebut oleh Bernard

²⁴ Abhishek Deshwal, “Revisiting the Theory of Late Rentierism: The Special Case of Kuwait”, *Social Science Research Network* (2017)

Lewis. Hal tersebut yang akan membawa negara-negara ini ke proses reformasi dari otokrasi politik ke sistem politik yang terbuka dan kompetitif. Demokrasi di negara-negara Arab akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan kebebasan politik untuk berbicara secara budaya dan sosial serta partisipasi individu dalam politik sulit didapatkan di negara-negara Arab.²⁵

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep *late rentierism* dan *rentier effects*. Konsep tersebut digunakan sebagai gagasan untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada isu area hubungan internasional yang semakin rumit dan kompleks. Dengan konsep ini peneliti dapat menjelaskan mengapa modernisasi ekonomi dan sosial tidak berdampak terhadap modernisasi politik Arab Saudi.

1.7.1 Teori *Rentier State*

Teori *rentier state* merupakan teori ekonomi politik yang berupaya untuk menjelaskan suatu negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari *external rent* atau sewa luar negeri yang diperoleh secara tidak produktif. Tujuan mendefinisikan *rentier state* adalah untuk menjelaskan dampak dari perkembangan ekonomi terkini, khususnya peristiwa atau fenomena minyak terhadap negara-negara di kawasan Arab.²⁶

²⁵ Muhammad Turhan Yani, "Wacana Pemerintahan Demokratis dan Dinamika Politik di Negeri-negeri Timur Tengah (Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki)", *Islamica*, Vol.1 No.2 (2007)

²⁶ Hazem Beblawi dan Giacomo Luciani, "The Rentier State", *Routledge Library Editions: Politics of The Middle East* (2015): 49

Menurut Hazem Beblawi, terdapat beberapa karakteristik tertentu dalam melihat definisi dari rentier state. Pertama, tidak ada satu hal pun yang murni *rentier* secara ekonomi. Kedua, sebuah *rentier economy* merupakan ekonomi yang bergantung pada *external rent* yang mendasar, dan merupakan satu hal yang penting dalam konsep *rentier economy*. Dan *internal rent* belum bisa dimasukkan sebagai karakteristik dari *rentier economy*. Ketiga, dalam sebuah *rentier state*, khususnya *rentier economy* sebagian besar dari mereka menggunakan kekayaan alamnya untuk didistribusikan atau segi pemanfaatannya.²⁷

Terdapat tiga fase utama dalam melihat teori *rentier state* di negara-negara Arab:

- ***Classical Rentier State Theory***

Dalam teori *rentier state* klasik terdapat karakteristik yang menjelaskan secara garis besar tentang *rentier state* klasik itu sendiri. Pertama, negara memperoleh sebagian besar pendapatannya dari *external rent*. Kedua, negara sangat alokatif dengan pengeluaran sosial yang tinggi dan sedikit pajak yang berlaku untuk warga negara. Ketiga, negara bersifat otonom, dimana negara bebas untuk bertindak dan menggunakan pendapatan dari *external rent* apabila negara telah memberikan dana yang cukup bagi masyarakat. Keempat, negara tidak banyak membuat kebijakan ekonomi.²⁸

²⁷ Hazem Beblawi dan Giacomo Luciani, 51

²⁸ Matthew Gray, "A Theory of "Late Rentierism" in the Arab States of the Gulf", *Center for International and Regional Studies* (2011): 24

- *Specialized Rentier State Theory*

Dalam teori *rentier state* khusus ini, negara bersifat alokatif tetapi tetap menerapkan beberapa perpajakan, dan juga negara tidak sepenuhnya memiliki otonomi dari warga negara, serta negara telah memiliki kebijakan ekonomi dan pembangunan. Dalam hal ini peran negara lebih bervariasi dalam tingkat ekonomi makro dan mikro.²⁹

- *Late Rentierism*

Ide *Late Rentierism* ditujukan sebagai cara untuk mengkarakteristisasi politik negara-negara Teluk. Pendapatan negara-negara tersebut terpusat pada sumber daya eksternal yang tidak produktif. *Late rentierism* menciptakan jenis negara tertentu yang lebih responsif, mengglobal, dan strategis dalam pemikiran. *Late rentierism* berasal dari adanya kekuatan globalisasi, kebutuhan akan peran negara dalam pembangunan atau kecenderungan kapitalis negara di kalangan *elite* yang berkuasa, dan tekanan sosial untuk reformasi dan pembangunan.³⁰ Terdapat lima karakteristik *late rentier state* yang menjelaskan kondisi ekonomi politik yang mereka lakukan saat ini, di antaranya:

1. Tidak demokratis, tetapi mengizinkan adanya pluralisme dan lebih responsif

Rentier state sama sekali bukanlah negara yang demokratis dan kontrol *rentier* nya diberikan otonomi penuh oleh masyarakat serta kebebasan dari tekanan

²⁹ Matthew Gray, 24

³⁰ Matthew Gray, 19

untuk melakukan reformasi. *Late Rentier State* mengakui perlunya keterbukaan untuk melakukan perubahan karena teknologi yang berkembang dan sarana komunikasi yang tersedia bagi para aktor sosial. Hal ini bisa dilakukan selama demokratisasi yang lebih substansial belum terjadi dan mengubah kepemimpinan negara atau mengubah sistem negara.³¹

2. Membuka diri terhadap globalisasi, tetapi dengan beberapa proteksionisme yang dijaga

Pada saat ini para pemimpin Arab sudah mulai membuka diri terhadap globalisasi, meskipun tidak sepenuhnya melakukan keterbukaan. Keterbukaan terhadap globalisasi sudah mulai dilakukan dengan cara berhati-hati untuk mempertahankan posisi sentralnya di dunia Muslim, serta memiliki sikap konservatif mengenai reformasi apapun yang dapat berdampak pada reputasi agama negara.³²

3. Bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga kebijakan pembangunan

Negara *late rentier* memiliki kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan, strategi sektoral pasca-industri, kebijakan tenaga kerja, dan sejenisnya. Sehingga, negara-negara Arab menjadi aktif dan kompeten dalam bidang ekonomi. Negara *late rentier* juga mempunyai kebijakan

³¹ Matthew Gray, "Towards A Theory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf", *Centre for Arab and Islamic Studies* (2010): 5-6

³² Matthew Gray, "Towards A Theory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf", 6

pembangunan, dimana negara berupaya untuk tidak hanya mengelola ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan hasil dan perbaikan terhadap ekonomi dan sosial.³³

Untuk meningkatkan kebijakan ekonomi, negara harus secara komprehensif dan maju dalam mengembangkan perangkat kebijakan ekonomi, bisnis, perdagangan, dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan. Reformasi yang dilakukan oleh negara-negara Arab lebih kepada penghapusan batasan atau birokrasi tertentu dalam hal bisnis, bukan menyesuaikan diri dengan liberalisasi ekonomi makro atau mikro dalam artian yang lebih mendalam.³⁴

4. Negara bersifat kapitalis, apapun kebijakan pembangunan yang diadopsi

Negara merupakan aktor yang paling kuat dalam perekonomian dan pemilik alat-alat produksi, sehingga memungkinkan mekanisme harga pasar untuk beroperasi dan sektor swasta memainkan perannya dalam aturan ekonomi.³⁵

Terdapat beberapa fitur dari kapitalisme negara. Pertama, perusahaan dan aset minyak dan gas adalah milik negara, tetapi untuk tujuan politik dalam mempertahankan rezim, perusahaan tersebut dioperasikan secara profesional dan efisien. Kedua, semua negara teluk adalah nasionalis sumber daya dalam menggunakan hidrokarbon sebagai aset strategis dan pendapatan yang diperoleh untuk tujuan politik, bukan hanya ekonomi. Ketiga, sektor-sektor utama ekonomi lainnya di luar hidrokarbon adalah milik negara. Keempat, mereka lebih menyukai

³³ Matthew Gray, "Towards A Theory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf", 7

³⁴ Matthew Gray, "Towards A Theory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf", 7

³⁵ Matthew Gray, "Towards A Theory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf", 7

sektor swasta, tujuannya adalah untuk menopang pelaku bisnis yang mendukung negara dan struktur kapitalis negara.³⁶

5. Menyadari adanya imperatif dan ancaman jangka panjang

Perlu untuk menjelaskan perencanaan keberlangsungan hidup jangka panjang dan kemakmuran politik terhadap rezim. Hal itu dapat dilakukan melalui diversifikasi yang dikelola dan melakukan pemasaran sebagian dari sektor ekonomi, sehingga menciptakan basis pekerjaan yang lebih luas dan sumber pendapatan perpajakan yang relatif rendah.³⁷

1.7.2 Rentier Effects

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk menguji hipotesis *rentier* suatu negara, di antaranya: faktor perpajakan, faktor pengeluaran, dan faktor larangan berkelompok.

- **Faktor Perpajakan**

Pajak merupakan persentase dari pendapatan pemerintah yang dikumpulkan melalui pungutan atas barang, jasa, pendapatan, laba, dan lainnya. Faktor perpajakan menunjukkan bahwa negara-negara yang mendapatkan dana dari pajak pribadi dan perusahaan seharusnya lebih demokratis. Sedangkan negara yang mendapatkan dana dari pajak perdagangan, *external rent*, dan biaya hak jalan seharusnya lebih ke arah otoriter.³⁸

³⁶ Matthew Gray, "Towards A Theory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf", 7

³⁷ Matthew Gray, "Towards A Theory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf", 8

³⁸ Michael L. Ross, "Does Oil Hinder Democracy?", *World Politics Vol.53 No.3* (2001): 347

- **Faktor Pengeluaran Pemerintah**

Dalam menjelaskan efek pengeluaran diukur dengan menggunakan konsumsi pemerintah sebagai persentase dari PDB. Dalam hal ini termasuk semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa oleh semua tingkatan pemerintahan. Tingkat pengeluaran yang lebih tinggi akan menghasilkan kemungkinan demokrasi yang lebih rendah.³⁹

- **Faktor Larangan Berkelompok**

Dalam faktor larangan berkelompok, menyiratkan bahwa pendapatan minyak memberikan pemerintah keuangan yang cukup, pemerintah akan menggunakan hal tersebut untuk mencegah pembentukan kelompok-kelompok sosial yang independen dan cenderung menuntut hak politik. Putnam mengatakan bahwa pembentukan kelompok sosial cenderung mendorong pemerintah ke arah yang lebih demokratis. Pada dasarnya pemerintah dengan sengaja mengancurkan kelompok sosial yang independen untuk tujuan politik negara.⁴⁰

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas tentang alasan modernisasi ekonomi dan sosial tidak berdampak pada modernisasi politik Arab Saudi. Hal ini didasari dengan terpenuhinya syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara *late rentierism*, dalam kasus ini adalah negara Arab Saudi. Untuk menganalisis alasan tidak berdampaknya modernisasi ekonomi dan sosial terhadap modernisasi politik digunakan konsep *rentier effects*.

³⁹ Michael L. Ross, 347

⁴⁰ Michael L. Ross, 334-335

Tabel 1.1 Tiga Fase Teori *Rentier State* di Negara-negara Arab

| Fase | Karakteristik | Penulis | Negara dicakup |
|--|---|--|--|
| Fase pertama (<i>Classical Rentier State</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar pendapatan negara dari <i>external rent</i> • Negara sangat alokatif dan sedikit pajak • Negara bersifat otonom • Negara tidak banyak membuat kebijakan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Mahdavy (1970) • Beblawi (1987;1990) • Luciani (1990) | <ul style="list-style-type: none"> • Iran (1960an-1970an) • Negara-negara Arab (1950an - 1980an) • Iraq (1960an-1980an) |
| Fase Kedua (<i>Specialized Rentier State</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Negara bersifat alokatif, namun menerapkan beberapa pajak • Negara tidak sepenuhnya otonom • Negara telah memiliki kebijakan ekonomi dan pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Crystal (1990) • Chaudhry (1997) • Hertog (2010) • Davidson (2008;2009) | <ul style="list-style-type: none"> • Arab Saudi dan Yaman sampai 1980an • Yordania dan Maroko |
| Fase Ketiga (<i>Late Rentierism</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Negara tidak demokratis, tetapi lebih responsif • Negara sudah terbuka dengan globalisasi, tetapi dengan beberapa proteksionisme • Negara sudah memiliki kebijakan ekonomi dan pembangunan • Negara bersifat kapitalis dalam kebijakan ekonomi • Negara menyadari adanya imperatif dan ancaman jangka panjang | <ul style="list-style-type: none"> • Moore (2004) • Hertog (2010) • Hvidt (2009;2011) | <ul style="list-style-type: none"> • Negara-negara Arab: Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab (1990an-sekarang) |

Sumber: Disusun oleh penulis

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan menekankan pada kedalaman makna ataupun data bukan perluasan data. Di samping itu, metode kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang

berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data statistik.⁴¹

Jenis penelitian ini adalah analisis eksplanatif, yaitu penelitian yang berfokus menganalisis keterkaitan atau pengaruh antar variabel dalam mengkaji suatu isu atau fenomena secara lebih mendalam dan terperinci.⁴² Peneliti berfokus pada penjelasan mengapa modernisasi ekonomi dan sosial dalam *Saudi Vision 2030* tidak berdampak terhadap modernisasi politik di Arab Saudi.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan yaitu dari tahun sebelum dikeluarkannya kebijakan *Saudi Vision 2030* yaitu dari tahun 2014-2019. Pemilihan mulai dari tahun 2014 adalah karena pada tahun tersebut bermula terjadinya penurunan harga minyak yang signifikan sehingga mengakibatkan Arab Saudi berusaha untuk tidak bergantung lagi pada pendapatan minyak.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian hubungan internasional terdapat dua sasaran analisis, yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis merupakan unit atau variabel yang perilakunya hendak dideskripsikan, diramalkan, dan dijelaskan. Unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang hendak

⁴¹ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", Makara, Sosial Humaniora", *Universitas Indonesia* 9, No.2 (2005): 57-65

⁴² Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. (Malang: Kencana Prenada Media Group, 2009): 59-60

dideskripsikan.⁴³ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah negara Arab Saudi, sedangkan unit eksplanasinya adalah *Saudi Vision 2030*. Tingkat analisis dari penelitian ini adalah pada tingkat negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana peneliti mengambil dan menganalisis dari data-data yang sudah ada yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan *library research* atau penelitian pustaka dalam mendapatkan data-data yang relevan dari sumber dalam bentuk literatur akademik yang berkaitan dengan *Saudi Vision 2030*, kondisi politik Arab Saudi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan modernisasi di Arab Saudi. Penelitian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.⁴⁴

Dalam penelitian ini, peneliti banyak mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan modernisasi politik Arab Saudi dalam *Saudi Vision 2030* dari berita-berita seperti CNBC News, DDTC News, Detik News, dan situs berita lainnya dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti “modernisasi politik di Arab Saudi”, “*Saudi Vision 2030*”, “Arab Saudi sebagai negara *late rentier*”. Peneliti mengumpulkan beberapa berita dan artikel yang berkaitan langsung dengan Arab Saudi, kemudian menjelaskannya dalam konteks permasalahan modernisasi politik Arab Saudi. Peneliti juga mengumpulkan data dari beberapa dokumen seperti

⁴³ Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES): 102-103

⁴⁴ M. Nazir, “Metode Penelitian”, Ghalia, 2003: 27

dokumen resmi pemerintah Arab Saudi, jurnal akademik seperti *Middle East Journal*, dan artikel-artikel akademik yang berkaitan dengan permasalahan politik di Arab Saudi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menemukan dan mengartikan serangkaian data dalam sebuah penelitian.⁴⁵ Terdapat beberapa tahapan dalam menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian ini, tahapan tersebut di antaranya:

Tahap pertama adalah pengelompokan data. Peneliti mengelompokkan data yang sudah dikumpulkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data-data dan mengelompokkan data-data tersebut terkait dengan modernisasi ekonomi dan sosial dalam *Saudi Vision 2030* yang terjadi di Arab Saudi. Kemudian, peneliti mengelompokkan data yang berkaitan dengan kendala dan permasalahan modernisasi politik di Arab Saudi.

Tahap kedua adalah reduksi data. Peneliti menyaring data-data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya, dengan tujuan untuk menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data-data dari hasil penyaringan tersebut kemudian menjadi sumber dasar untuk melakukan penelitian ini. Proses seleksi data dilakukan dengan proses membaca cepat atau *skimming* pada setiap bahan yang telah

⁴⁵ Mochtar Mas'ood, 9

dikumpulkan untuk melihat data-data tersebut secara garis besar apakah membantu menjawab pertanyaan penelitian atau tidak.

Tahap ketiga adalah interpretasi dan penyajian data. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk pemaknaan terhadap setiap bahan yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada Bab 1, peneliti memaparkan hal-hal dasar yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dan hal tersebut menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Bab 2, peneliti menyajikan data mengenai modernisasi ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam *Saudi Vision 2030* berdasarkan data-data yang telah dikelompokkan dan disaring sebelumnya. Pada Bab 3, peneliti menyajikan permasalahan-permasalahan dan faktor penghambat proses terjadinya modernisasi politik di Arab Saudi. Bab 4, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan kerangka konseptual *Late Rentierism* dan *Rentier Effects*. Analisis pada Bab 4 ini dilakukan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Arab Saudi diidentifikasi sebagai bentuk modernisasi ekonomi dan sosial, namun, tidak berdampak terhadap modernisasi politik di Arab Saudi.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa sub-bab di antaranya, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: MODERNISASI EKONOMI DAN SOSIAL DALAM SAUDI VISION 2030 DI ARAB SAUDI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai dinamika modernisasi ekonomi dan sosial dalam *Saudi Vision 2030* di Arab Saudi. Penjelasan mengenai kebijakan *Saudi Vision 2030* yang menjadi tindakan reformasi pemerintah Arab Saudi. Dalam kebijakan tersebut telah dilakukan keterbukaan ekonomi dengan adanya diversifikasi dan investasi. Dalam bidang sosial, perempuan sudah diberikan izin dan kebebasan berkendara dan memasuki stadion atau tempat keramaian.

Bab III: PERMASALAHAN MODERNISASI POLITIK DI ARAB SAUDI

Dalam bab ini terdapat penjelasan tentang permasalahan dan kondisi politik yang ada di Arab Saudi. Kondisi politik di Arab Saudi masih memiliki sikap yang otoriter, dan belum mengalami keterbukaan kepada warga negara dalam hal mengeluarkan atau menyuarakan pendapat maupun kritik terhadap pemerintahan. Ketika ada orang yang ingin melakukan kritik terhadap pemerintah Arab Saudi, maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan penangkapan kepada orang tersebut.

Bab IV: ANALISIS MODERNISASI POLITIK DI ARAB SAUDI MELALUI SAUDI VISION 2030

Dalam bab ini terdapat analisis mengenai alasan modernisasi ekonomi dan sosial tidak berdampak pada modernisasi politik di Arab Saudi. Analisis dilakukan menggunakan konsep *late rentierism* dan *rentier effects* seperti yang telah dipaparkan pada bab 1.

Bab V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan terkait dengan “analisis modernisasi politik Arab Saudi melalui *Saudi Vision 2030*” serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.

